

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Iswardono (1993:4) mendefinisikan uang adalah sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang. Dan juga dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk membayar sejumlah utang dengan kepastian tanpa penundaan. Sedangkan menurut Diulio (1993:3) uang adalah tergantung pada penggunaannya sebagai alat pertukaran, unit penghitung, penyimpan nilai, dan sebagai standart pembayaran yang tertanggungkan.

Uang memiliki beberapa fungsi dan memainkan berbagai peran dalam perekonomian. Pada dasarnya fungsi uang yaitu : (1). Alat kesatuan hitung, (2). Alat penukar, (3). Penyimpan kekayaan, (4). Standar pembayaran masa depan, (Rahardja, 1997:9-11). Selain memiliki fungsi ekonomi uang juga memiliki fungsi dalam politik dan perjuangan, uang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan serta menunjukkan kedaulatan sebuah negara.

Pentingnya keberadaan uang sebagai alat perjuangan menegakkan kedaulatan ekonomi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia memainkan peran yang tidak kalah hebatnya. Uang dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar dan simbol sebuah negara yang berdaulat, namun lebih dari pada itu, uang juga merupakan senjata dalam menghadapi serangan ekonomi yang dilancarkan oleh Belanda kepada Indonesia (Darsono dkk, 2017:206). Uang

tersebut dijadikan sebagai alat perjuangan karena merupakan atribut kemerdekaan bangsa dan langkah awal sistem keuangan Indonesia.

Paska proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia keadaan ekonomi moneter di Indonesia masih sangat kacau. Hal ini ditandai dengan masih beredarnya uang kertas pendudukan Jepang di kalangan masyarakat dan dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia yang diperkirakan sejumlah 4 milyar rupiah. Pemerintah RI menyadari bahwa belum mampu untuk mengeluarkan mata uangnya sendiri, maka melalui Maklumat Presiden RI no. 1/10, tanggal 3 Oktober 1945, menetapkan untuk sementara waktu masih berlaku tiga jenis mata uang diseluruh wilayah Republik Indonesia yaitu: pertama uang De Javasce Bank, kedua uang Hindia Belanda, ketiga uang Pendudukan Jepang (Soedarjdo, 1991:2-4). Akibat uang Jepang yang masih beredar di wilayah Indonesia itu menjadi salah satu faktor kekacauan ekonomi yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada saat itu.

Berdasarkan buku “Bank Notes and Coin From Indonesia 1945-1990”.

Wakil presiden RI Drs. Mohammad Hatta mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam pidatonya melalui RRI Yogyakarta untuk menyongsong keluarnya ORI menyatakatan antara lain:

“Besok tanggal 30 oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar Oeang Republik Indonesia sebagai satu satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang sah, tidak laku lagi. Beserta dengan uang Jepang itu ikut pula tidak laku uang Javasche Bank. Dengan ini tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa Jepang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita.”

“Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh republik kita. Uang republik keluar dengan membawa perubahan nasib rakyat, istimewa pegawai negeri, yang sekian lama menderita inflasi uang Jepang. Rupiah republik yang harganya di Jawa lima puluh kali harga rupiah Jepang. Di Sumatera seratus kali, menimbulkan sekaligus tenaga pembeli kepada golongan rakyat yang bergaji tetap, yang selama hidup dari pada menjual pakaian dan perabot rumah, dan juga kepada rakyat yang menghasilkan, yang menghargakan tukar penghasilannya jadi tambah besar.”

Uang Republik Indonesia (ORI) adalah uang kertas pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dikeluarkannya uang ini bertujuan untuk mengatasi inflasi karena banyaknya mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda yang masih beredar di masyarakat dan masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada saat Indonesia baru merdeka. Selain untuk mengatasi inflasi uang ini juga bertujuan untuk legitimasi kedaulatan Republik Indonesia. Setelah dikeluarkannya ORI ternyata tidak membuat kondisi ekonomi keuangan Republik Indonesia membaik, hal ini dikarenakan peredaran ORI mengalami banyak kendala karena pendudukan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia tidak tinggal diam, Belanda berusaha membuat perekonomian Republik semakin terpuruk, dan Belanda juga melemahkan perekonomian Indonesia dengan mengeluarkan ORI palsu. Selain kondisi keamanan yang kurang mendukung, dan pemalsuan uang ORI oleh NICA membuat pengedaran ORI di tahap awal sangat sulit dan tidak berlangsung sesuai target yang diharapkan (Darsono dkk, 2017:240-243).

Setelah ORI beredar di wilayah Jawa dan Madura, peredaran ORI di Sumatera tidak dapat terlaksana dengan baik. Belanda telah melakukan blokade ekonomi dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera.

Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan bahwa untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Madura, untuk sementara tetap menggunakan uang Jepang. Namun seiring berjalannya waktu pengiriman ORI ke Pulau Sumatera tidak dapat terealisasikan karena Agresi militer Belanda I pada tahun 1947 mempersulit keadaan dan tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pengiriman ORI (Darsono dkk, 2017: 243-244). Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah agar kebutuhan dan perekonomian tiap-tiap daerah tidak terhambat, maka melalui Peraturan Pemerintah No. 19/1947 tertanggal 26 Oktober 1947 Pemerintah Daerah tingkat Provinsi, Keresidenan, dan Kabupaten diberikan wewenang untuk menerbitkan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA). ORIDA adalah uang kertas atau tanda pembayaran yang sah yang berlaku secara terbatas didaerah tersebut (Darsono dkk, 2017:248).

Hak untuk mencetak dan mengedarkan uang ORIDA di daerah masing-masing disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat di Sumatera. Ada beberapa jenis uang yang berlaku di Indonesia pada periode 1946-1949 yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) yang berlaku di Jawa saja. Oeang Republik Indonesia Propinsi Sumatera (ORIPS) yang berlaku disebagian Sumatera . Oeang Republik Indonesia Tapanuli (ORITA) yang berlaku di Tapanuli saja. Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara (ORIPSU), yang berlaku di Provinsi Sumatera Utara, Oeang Republik Indonesia Baru Aceh (ORIBA) yang berlaku di daerah Aceh. Oeang Republik Indonesia Daerah Banten (ORIDAB) yang berlaku di Banten (Iswardono,1993:18).

Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS) adalah ORIDA pertama di Pulau Sumatera yang diterbitkan di Pematang Siantar oleh percetakan Deli yang sebelumnya telah dipindahkan dari Berastagi ke Kota Pematang Siantar. Uang ini diterbitkan di Pematang Siantar karena ibu kota provinsi Sumatera pindah dari Medan ke Pematang Siantar, kondisi keamanan di Medan sudah tidak aman karena Belanda dan Tentara sekutu telah mendarat di Belawan dan menduduki kota Medan. Pada tanggal 18 Oktober 1945 pasukan sekutu mulai melakukan profokasi melalui maklumat yang dikeluarkan oleh Brigadir Jenderal TED Kelly. Maklumat itu berisi tentang larangan kepada bangsa Indonesia memegang senjata dan harus menyerahkannya kepada Sekutu. Pada tanggal 9 Maret 1946, tentara Sekutu yang berada di Tanjung Morawa melakukan teror yang kemudian mendapat tantangan dari TKR dan Laskar Rakyat. Selanjutnya pasukan Sekutu melakukan berbagai macam teror didalam kota Medan yang mengakibatkan kota Medan tidak aman.

Melihat keadaan kota Medan yang semakin tidak aman, Dewan Perwakilan Rakyat se-Sumatera melakukan rapat di Bukit Tinggi pada tanggal 17-19 April 1946 dan menghasilkan keputusan memindahkan ibukota Provinsi Sumatera dari Medan ke Pematang Siantar. Berdasarkan keputusan tersebut secara berangsur-angsur ibukota pemerintah Provinsi Sumatera berpindah ke Pematang Siantar diawali dengan pemindahan kantor Gubernur Sumatera beserta staf dan Markas Besar TKR Divisi IV/Komandan Sumatera. Perusahaan Percetakan Milik Negara II yang terletak di Jalan Gudang (sekarang percetakan Deli) juga turut dipindahkan, semula ke Berastagi dan kemudian diteruskan ke Pematang Siantar.

Percetakan inilah yang dijadikan pemerintah Sumatera sebagai percetakan yang mencetak Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS) dan membantu pekerjaan pemerintah lainnya. Tujuan dipindahkannya ibukota Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar agar roda Pemerintahan Republik di Sumatera tetap berjalan sehingga menunjukkan eksistensi keberadaan Indonesia, (Mustafa,1996:75).

ORIPS diterbitkan pada tanggal 11 April 1947 sebagai tanda pembayaran sementara yang khusus berlaku di daerah Sumatera saja. Pengeluaran ORIPS ini diatur dengan Maklumat Gubernur Sumatera Teuku Mohammad Hassan No. 92/K.O tanggal 4 April 1947. Dalam maklumat ini ditetapkan bahwa ORIPS berlaku diseluruh dan sebagian wilayah Sumatera sebagai alat pembayaran yang sah. Uang ORIPS terdiri dari pecahan Rp. 1, Rp. 5, Rp. 10, dan Rp. 100. Uang ini ditandatangani oleh R.A. Herman dan R.M. Amin. Untuk pengamanan dari pemalsuan uang ORIPS menggunakan kode kontrol. Masing-masing nilai uang memiliki warna yang berbeda, ada yang berwarna biru dan hijau. Untuk sisi depan uang terdapat lukisan gambar Soekarno, gunung, aktivitas petani disawah dan nilai uang, (Darsono dkk, 2017:248).

Pada tanggal 1 Juli 1947 terjadi Agresi Militer Belanda I di Pematang Siantar. Akibat dari Agresi ini, Percetakan ORIPS Jatuh ketangan Belanda dan percetakan ORIPS terhenti. Agar roda pemerintahan dan perekonomian Provinsi Sumatera tetap berjalan maka Gubernur Mr. Tengku Muhamad Hassan beserta seluruh staf pemerintahan RI pindah dan menetap di Bukittinggi karena pada masa agresi militer Belanda I Bukittinggi masih dalam keadaan aman. Di

Bukittinggi percetakan ORIPS dilanjutkan oleh Percetakan Tentara, Pada tahun 1948 percetakan ORIPS dipindahkan ke percetakan di jalan Panorama Bukittinggi.

Pemberlakuan ORIPS di wilayah Sumatera sebagai alat pembayaran yang sah merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian tentang uang memang sudah pernah dilakukan, namun hanya mengkaji latar belakang munculnya ORIDA di sebagian wilayah Sumatera. Khusus penelitian tentang pengeluaran uang ORIPS sebagai alat perjuangan kemerdekaan di Sumatera belum pernah dikaji sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui sejarah terkait alat tukar tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengadakan penelitian untuk mengulas dan membahas tentang Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS) dengan judul **“Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS) Pematang Saiantar Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Sumatera Pada Tahun 1947-1949.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat didefinisikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Identifikasi kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan
- b. Latar belakang pencetakan Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS)
- c. ORIPS dalam perjuangan kemerdekaan RI
- d. Pencetakan Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS).
- e. Jenis uang yang beredar pada masa kemerdekaan

1.3 Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang akan dikaji, maka perlu membatasi permasalahan penelitian ini, yaitu: “Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS) Pematang Siantar Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di Sumatera Pada Tahun 1947-1949.”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari persoalan-persoalan di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Mengapa Provinsi Sumatera mencetak ORIPS?
- b. Bagaimana proses pencetakan Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS)?
- c. Bagaimana peran ORIPS dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Sumatera?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengapa Provinsi Sumatera Mencetak ORIPS.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pencetakan Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS).
- c. Untuk mengetahui bagaimana peran Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera dalam perjuangan kemerdekaan RI.

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan sejarah bahwa uang berfungsi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia
- b. Memberikan informasi kepada pembaca tentang proses pencetakan Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS)
- c. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk referensi penelitian dan bahan masukan yang telah ada maupun digunakan bagi peneliti lain sebagai bahan rujukan.

THE *Character Building*
UNIVERSITY